

EFEKTIFITAS PROGRAM BPJS TERHADAP PENGGUNAAN KARTU BPJS PADA ANGGOTA POLRI, PNS DAN KELUARGA DI KLINIK PRATAMA POLRES HULU SUNGAI UTARA

Novia Rany Elezza¹, Yeni Riza², Elsi Setiandari L.O³

¹Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan MAB, 16070383

²Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan MAB1025078501

³Kesehatan Masyarakat, 13201, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Kalimantan MAB1126018602

E-mail: noviaranyelevza@gmail.com/0895338717503

ABSTRAK

Pemerintah sedang berupaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan menggunakan jaminan sosial. Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan jaminan yang bermanfaat warga atau komunitas untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. Salah satunya adalah melalui kesehatan program keamanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara jaminan sosial (BPJS). Kesehatan BPJS adalah program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan masyarakat di bidang kesehatan. Program ini diharapkan dapat melayani dan memberikan perlindungan sehingga semua orang mendapatkan akses kesehatan sama. Berdasarkan latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas program BPJS terhadap penggunaan kartu BPJS dan faktor penghambat dalam efektifitas program BPJS pada anggota polri, pns, dan keluarga di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif yang disajikan secara deskriptif melalui wawancara mendalam. Populasi dan sampel adalah penelitian ini dengan memakai metode *purposive sampling*. Sampel yang peneliti lakukan 6 sampel yang terdiri dari 2 anggota polri, 2 pns polres hsu sebagai informan utama dan 2 petugas klinik sebagai informan pendukung. Dari hasil penelitian dengan informan dapat disimpulkan bahwa program BPJS Kesehatan di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara masih kurang efektif. Hal tersebut dilihat dari beberapa indikator, yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Pemantauan Program dan Tujuan Program. Disarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara, serta mempertahankan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan Jaminan Kesehatan.

Kata Kunci: Efektifitas, Pelayanan Kesehatan, Program BPJS.

ABSTRACT

The government is working to improve the quality of public health by using social security. Social security is a form of social protection organized by the government with guarantees that benefit citizens or communities to meet the basic needs of life. One of them is through health security programs organized by social security providers (BPJS). Health BPJS is a government program to meet the basic needs of people's lives in the health sector. This program is expected to be able to serve and provide protection so that all people get access to the same health. Based on the background of this study aims to determine the effectiveness of the BPJS program on the use of BPJS cards and inhibiting factors in the effectiveness of the BPJS program for members of the national police, civil servants, and families in the North Hulu Sungai Police Precinct Clinic. This study uses a qualitative research design that is presented descriptively through in-depth interviews. Population and sample are this research using purposive sampling method. The sample of researchers conducted 6 samples consisting of 2 members of the national police, 2 police officers hsu as the main informant and 2 clinical officers as supporting informants. From the results of research with the informants it can be concluded that the BPJS Health program at the North Hulu Sungai Police Precinct Clinic is still less effective. This can be seen from several indicators, namely Target Accuracy, Program Socialization, Program Monitoring and Program Objectives. It is recommended to conduct socialization to the community, especially in the Primary Clinic of North Hulu Sungai Police, and to maintain and improve the quality of Health Insurance services.

Keywords: *Effectiveness, Health Services, BPJS Program.*

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak fundamental setiap individu dinyatakan secara global di dalam Konstitusi Organisasi Kesehatan Sedunia, dan secara Nasional dalam pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Semua orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 28H ayat 1 bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam konteks implementasi Program BPJS Kesehatan pada Klinik Pratama Polres HSU, maka dapat dideskripsikan bahwa yang dimaksud tingkat komunikasi (Sosialisasi) tersebut adalah sebuah proses penyampaian pesan-pesan kebijakan yang dilakukan oleh Tenaga Medis kepada masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan-tujuan yang ingin dicapai dari adanya Program tersebut. Klinik Pratama Polres HSU bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dalam pelayanan kesehatan Anggota Polri, PNS dan Keluarganya. Klinik Pratama Polres HSU adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dalam pelayanan kesehatan kepada Anggota Polri dan Keluarga yang menyediakan pelayanan medis dasar dan spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan (perawat atau bidan) dan dipimpin oleh seorang Anggota Polri dan tenaga medis (dokter umum, dokter gigi).

Penyampaian informasi tentang program BPJS Kesehatan, merupakan tahapan yang penting yang harus dilakukan oleh pihak terkait. Hal ini menyangkut kejelasan pelayanan yang didapat masyarakat sebagai anggota BPJS Kesehatan tersebut. Masalah itu, justru muncul pada unsur pengaplikasiannya, terutama pada aspek rujukan, besaran biaya dan syarat kepesertaan.

Sebagian masyarakat masih banyak yang belum mengetahui teknis mendapatkan pelayanan sesuai dengan prosedur BPJS Kesehatan. Padahal semua anggota Polres Hulu Sungai Utara di daftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan, untuk setiap paket pelayanan yang berbeda sesuai dengan pangkat atau golongan dengan pendaftaran yang sangat mudah yaitu hanya dengan membawa kartu keluarga dan slip gaji dari kasi keuangan. Masyarakat yang menjadi peserta bisa berobat ke faskes tk 1 yang ditunjuk sesuai yang tertera dikartu BPJS baik itu puskesmas, klinik kesehatan atau dokter pribadi dan rumah sakit. Sebagian masyarakat belum mengetahui tentang sistem rujukan tersebut.

Masalah lainnya dalam hal komunikasi yang tidak jelas yaitu terkait pelayanan pelayanan yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan. Karena tidak semua pelayanan kesehatan ditanggung oleh pihak BPJS Kesehatan, termasuk obat-obat yang diberikan kepada pasien peserta BPJS Kesehatan.

Dari masalah-masalah diatas, peraturan tentang BPJS Kesehatan seakan-seakan diimplementasikan secara terburu-buru. Hal ini bisa dilihat dari perubahan-perubahan tentang peraturan-peraturan sistem pendaftaran BPJS Kesehatan. Diawal implementasi BPJS kesehatan, pendaftaran terlihat loyal untuk semua masyarakat bisa melakukan pendaftaran BPJS ketika mereka membutuhkan, baik ketika sedang sakit maupun tidak, pelayanan pun akan langsung diberikan ketika sudah mendaftar (Jumaidi, 2017).

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Sugiyono (2017: 8) mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah Untuk mengungkap berbagai masalah dan mengetahui apakah efektif penggunaan kartu BPJS di Klinik Pratama Polres HSU, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

A. Hasil dan Pembahasan

1. Ketepatan Sasaran Program

Ketepatan sasaran dapat dilihat dari keikutsertaan seluruh anggota keluarga dalam program BPJS Kesehatan. Berdasarkan hasil dari wawancara dengan anggota polri yang mengatakan masih ada beberapa anggota yang belum mendaftarkan anggota keluarganya (istri/anak), dapat dilihat pada kotak dibawah ini.

Apakah bapak/ibu dan keluarga sudah memiliki kartu BPJS?

“ Kalau saya sudah punya, cuma istri saya belum saya daftarkan. Ini kebetulan hari ini saya mau mendaftarkan dan memasukkan ke daftar tanggungan saya” (IU1)

“ Sudah, cuma istri dan anak saya belum saya daftarkan sebagai peserta bpjs dan belum memiliki kartu” (IU2)

“ Iya, saya dan keluarga sudah memiliki kartu BPJS” (IU3)

“ Iya, saya sudah memiliki kartu BPJS” (IU4)

Mengapa bapak belum mendaftarkan istri dan anak sebagai peserta?

“ Karena KK (Kartu Keluarga) saya baru selesai. (IU1)

“ Karena KK (Kartu Keluarga) saya belum diperbarui dan Akta anak tidak ada. Belum sempat mengurus” (IU2)

Menurut hasil wawancara dengan petugas dari Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara juga mengatakan masih ada beberapa anggota yang belum mendaftarkan anggota keluarganya dan belum memasukkan ke dalam daftar tanggungannya, dapat dilihat pada kotak dibawah ini.

Apakah semua anggota Polri, PNS dan keluarga sudah terdaftar BPJS?

“ Untuk anggota semua sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS, tapi untuk anggota keluarga seperti istri/suami dan anak tidak semua terdaftar sebagai peserta BPJS.” (IP1)

“ Semua anggota polri disini sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS, namun istri/suami dan anak yang mengurus sebagai tanggungan adalah peserta.” (IP2)

Menurut bapak/ibu mengapa dan apa alasan mereka yang belum mendaftarkan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS?

“ Karena masih ada anggota yang belum menyerahkan berkas ke Kasi Keuangan untuk mengurus daftar tanggungan.” (IP1)

“ Karena masih ada beberapa dari anggota yang belum mendaftarkan anggota keluarganya karena sibuk/tidak sempat untuk mengurus”. (IP2)

Menurut bapak/ibu apakah anggota sudah mengetahui apa aja syarat atau berkas yang perlu disiapkan untuk mendapatkan kartu BPJS ini?

“ Sejak sudah diberitahu sejak awal apa saja syarat untuk mendaftarkan anggota keluarga.” (IP1)

“ Semua anggota sudah diberitahu syarat dan berkas apa saja yang harus dilengkapi dan diserahkan ke Kasi Keuangan untuk mengurus daftar tanggungan.” (IP2)

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketepatan sasaran program BPJS masih kurang efektif di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara. Karena masih ada anggota yang belum mendaftarkan anggota keluarganya (istri/anak) sebagai peserta BPJS dengan alasan belum memenuhi berkas untuk diserahkan ke Kasi Keuangan untuk mengurus daftar tanggungan dan memenuhi syarat untuk mendaftarkan anggota keluarganya sebagai peserta BPJS.

2. Sosialisasi Program

Sosialisasi Program adalah kemampuan penyelenggara program BPJS dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program BPJS dapat tersampaikan kepada anggota polri, pns dan keluarga. Menurut hasil wawancara dengan Informan Utama tidak ada sosialisasi program BPJS di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara, dapat dilihat pada kotak dibawah ini.

Apakah klinik Pratama Polres HSU selalu melaksanakan konsultasi publik/ sosialisasi mengenai program BPJS Kesehatan?

“ Tidak ada sosialisasi program BPJS lagi.” (IU1)

“ Tidak ada.” (IU2)

“ Tidak ada sosialisasi.” (IU3)

“ Tidak ada lagi sosialisasi tentang program BPJS” (IU4)

Menurut hasil wawancara dengan Informan Pendukung juga disebutkan tidak ada sosialisasi program BPJS di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara, seperti hasil wawancara pada kotak dibawah ini.

Menurut bapak/ibu masih kurangkah penyuluhan atau sosialisasi tentang program BPJS ini?

“ Iya. Kurangnya penyuluhan yang membuat anggota kurang memperhatikan pentingnya kartu BPJS.” (IP1)

“ Iya. Masih kurang, karena masih ada beberapa anggota yang belum paham dengan peraturan BPJS Kesehatan. Karena tugas peserta adalah harus memahami ketentuan dan peraturan. Dengan paham peserta bisa mendapatkan manfaat yang optimal” (IP2)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya Sosialisasi Program tentang BPJS Kesehatan.

3. Pemantauan Program

Pemantauan program adalah kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Menurut hasil wawancara dengan informan utama dapat dilihat bahwa peserta sudah cukup memahami tentang program BPJS, seperti hasil wawancara yang ada pada kotak dibawah ini.

Apakah bapak/ibu mengetahui apa saja program BPJS Kesehatan?

“ Ya. Program BPJS ada Jaminan Kecelakaan Kerja.” (IU1)

“ Program BPJS ada Jaminan Kematian.” (IU2)

“ Ya. Program BPJS ada Jaminan Pensiun.” (IU3)

“ Ya. BPJS kesehatan adalah yang diberikan pemerintah sebagai jaminan kesehatan. Salah satu programnya ada Jaminan Hari Tua” (IU4)

Apa saja manfaat program BPJS Kesehatan?

“ Jaminan agar mudah saat berobat.” (IU1)

“ Itu untuk jaminan kesehatan seumur hidup.” (IU2)

“ Saya sekeluarga akan terlindungi jikalau sakit, terutama saat sakit yang berbiaya mahal.” (IU3)

“ Kalau saya sakit semuanya ditanggung oleh BPJS.” (IU4)

Menurut hasil wawancara dengan informan pendukung dapat diketahui dan dilihat terdapat ada kendala yang membuat penggunaan kartu BPJS terhambat karena masih kurangnya kesadaran peserta akan pentingnya kartu BPJS seperti hasil wawancara dengan informan pendukung pada kotak dibawah ini.

Menurut bapak/ibu apa saja hambatan atau kendala pada pembuatan kartu BPJS pada Anggota Polri, PNS dan Keluarga?

“Masih kurangnya kesadaran peserta akan pentingnya kartu BPJS walaupun tidak sakit.” (IP1)

“ Masih ada beberapa anggota yang belum sempat mengurus karena kesibukan sehingga masih ada anggota keluarga yang belum didaftarkan sebagai peserta BPJS”. (IP2)

Dari wawancara diatas dapat dilihat dari pemantauan program sudah dilakukan oleh pihak Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara, namun karena masih kurangnya kesadaran peserta akan pentingnya kartu BPJS dan dikarenakan kesibukan yang membuat

ada beberapa anggota yang belum sempat mengurus mendaftarkan keluarga menjadi peserta BPJS dan memasukkan anggota keluarga ke daftar tanggungan.

4. Tujuan Program

Tujuan program BPJS Kesehatan adalah untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Dari hasil wawancara dengan informan utama, tujuan dari BPJS untuk mewujudkan jaminan kesehatan kepada setiap peserta sudah dirasakan manfaatnya oleh narasumber, seperti hasil wawancara pada kotak dibawah ini.

Apakah BPJS sudah memberikan jaminan kesehatan kepada Anggota Polri, PNS, dan keluarga?

“ Iya, karena saya sudah mendapatkan pelayanan tingkat pertama di Klinik Pratama Polres HSU seperti rawat jalan yaitu dengan konsultasi dan pemeriksaan dokter umum, tindakan, penunjang diagnostik dan obat.”
(IU1)

“ Iya, saya sudah pernah mendapat pelayanan tingkat lanjutan seperti rawat inap yaitu dengan tingkat pelayanan kelas II sesuai dengan pangkat saya briptu, konsultasi dokter, tindakan, penunjang diagnostik dan obat”
(IU2)

“ Iya. Kemaren waktu saya sakit petugas klinik yang datang langsung kerumah (Home Visite)memberikan pelayanan kesehatan dan memberikan terapi obat sesuai dengan keluhan.” (IU3)

“ Iya, saya sudah mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang terjamin, yaitu dengan adanya program BPJS Kesehatan Ibu dan Anak yang menanggung semua pemeriksaan kehamilan, nifas, persalinan,dan imunisasi bayi. (IU4)

Menurut hasil wawancara dengan informan pendukung tujuan dari program BPJS Kesehatan di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara sudah efektif dan efisien.

Menurut bapak/ibu apakah sudah efektif penggunaan kartu BPJS di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara?

“ Sudah sangat efektif, karena disini sudah melayani peserta yang sudah memiliki kartu untuk diberikan pelayanan sesuai dengan prosedur. Di Klinik Pratama Polres HSU sudah dilengkapi dengan beberapa tenaga medis. Yaitu 2 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, 2 orang perawat, 1 orang perawat gigi, 1 orang farmasi, dll.” (IP1)

“ Iya, disini sudah sangat efektif untuk penggunaan kartu BPJS maupun pelayanan kesehatannya. Jika ada yang sakit langsung kami tangani dan kami berikan obat sesuai dengan keluhan. Dan jika pasien perlu dirujuk kami akan merujuk lanjut ke faskes rujukan tingkat lanjutan.” (IP2)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas dapat disimpulkan tujuan dari Program BPJS memberikan jaminan kesehatan untuk pesertanya di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara.

PENUTUP

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari penelitian tentang Efektifitas Program BPJS Terhadap Penggunaan Kartu BPJS pada Anggota Polri, PNS, dan Keluarga di Klinik Pratama Polres HSU masih kurang efektif. Hal tersebut ditinjau dari beberapa indikator, yaitu Ketepatan Sasaran, Sosialisasi Program, Pemantauan Program dan Tujuan Program. Hasil analisis pada pembahasan maka sebagaimana yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketepatan sasaran di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara masih belum, tercapai karena masih ada beberapa anggota keluarga dari peserta belum didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan tidak dimasukkan ke dalam daftar tanggungan.
2. Masih kurangnya sosialisasi Program BPJS Kesehatan di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara. Menjadi peserta BPJS Kesehatan tidak hanya ingin mendapatkan pelayanan kesehatan, namun salah satu cara untuk saling membantu sebagai sesama warga negara. Jaminan kesehatan yang diselenggarakan BPJS Kesehatan mempunyai prinsip gotong royong, yang berarti peserta yang sehat membantu peserta yang sakit, peserta yang mampu membantu peserta yang tidak mampu.
3. Pemantauan program sudah dilakukan oleh pihak Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara, namun karena masih kurangnya kesadaran peserta akan pentingnya kartu BPJS dan dikarenakan kesibukan yang membuat ada beberapa anggota yang belum sempat mengurus mendaftarkan keluarga menjadi peserta BPJS dan memasukkan anggota keluarga ke daftar tanggungan.
4. Tujuan dari program BPJS Kesehatan di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara masih belum tercapai karena masih adanya anggota polri, pns dan keluarga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan tidak dimasukkan ke daftar tanggungan. Namun untuk mutu kualitas pelayanan program BPJS di Klinik Pratama Polres Hulu Sungai Utara bagi para peserta BPJS yang sudah terdaftar dan mendaftarkan keluarganya menjadi peserta BPJS juga sudah merasakan terjaminnya kesehatan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak.

REFERENSI

- Abdul Solihin Wahab. (2005). Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- BPJS Kesehatan. PANDUAN PRAKTIS TENTANG KEPESERTAAN DAN PELAYANAN KESEHATAN
- Depkes RI. (2009). PROFIL KESEHATAN INDONESIA. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
- Gemma Putera Reka. (2012) Efektivitas Pelaksanaan Program Mulang Tiyuh Dalam Rangka Pemberdayaan Petani Di Kampung Simpang Asam Kecamatan Banjit Kabupaten Way Kanan. Lampung, 2012, hlm 35
- Hidayat. (1986). Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Isriawaty, F. S. (2015). TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 2, Volume 3, Tahun 2015.*
- Jones, Charles. 1994. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Jumaidi. (2017) PERAN RSUD PAMBALAH BATUNG AMUNTAI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KESEHATAN DI HULU SUNGAI UTARA. *Vol. 2, No. 1, Mei 2017*
- Mardiansyah, R. (2018). DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM PEMENUHAN HAK ATAS KESEHATAN DI INDONESIA. *Volume 4 Nomor 1 227.*
- Monica Pertiwi, Herbasuki Nurcahyanto. (2017) EFEKTIVITAS PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus pada Pasien Pengguna Jasa BPJS Kesehatan di Puskesmas Srandol). Vol.6 , No.2 , 2017*
- Nazir, Moh. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2010). Metodologi Penelitian Kesehatan. Jakarta : Rineka Cipta.
- Pertiwi M, dan Nurcahyanto H. (2016). EFEKTIVITAS PROGRAM BPJS KESEHATAN DI KOTA SEMARANG.
- Saksono, Prasetyo Budi. (1984). Efektivitas Prinsip Organisasi. Jakarta : Galaxy Puspa Mega
- Samfriati Sinurat, Indra Hizkia Perangin-angin, Josephine Christabel (2019) Hubungan Response Time Perawat dengan Tingkat Kepuasan Pasien BPJS di Instalasi Gawat Darurat. *Vol.5 No.1. Januari 2019*
- Shihab, A. (2012) Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. *Jurnal Legislasi Indonesia. 9(2): 175-190*
- Solichin Abdul Wahab (2012). Analisis kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara, *hlm 125*
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta, *hlm 15*

- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabes, *hlm 128*
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabes, *hlm 246*
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: PT Alfabes, *hlm 137*
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabes, *hlm 8*

